



PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT

FOCUS GROUP DISCUSSION DALAM RANGKA PENGENDALIAN RISIKO PADA PEMERINTAH KOTA BOGOR

**KOORDINATOR PENGAWASAN BIDANG AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH (KORWAS APD II)**

JAYA RAHMAD

BOGOR, 17 – 18 NOVEMBER 2021

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN SPIP

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 58 ayat (1) dan (2):

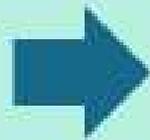
*"Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan **Peraturan Pemerintah.**"*

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

"SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."



SPIP dalam PP 60/2008 bukan hanya terkait pengendalian intern namun mencakup proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GOVERNANCE, RISK, AND CONTROL).



SAIPI Paragraf 3100 :

"Proses tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern masing-masing tidak didefinisikan secara terpisah dan berdiri sendiri sebagai suatu proses dan struktur, melainkan memiliki hubungan antara proses tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Oleh karena itu, Auditor harus mengevaluasi proses tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern auditi secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan".

PP 60/2008 TENTANG SPIP

Pasal 1

SPI merupakan proses integral untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi

Pasal 11

Peran APIP:

- Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan 3E
- Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas MR
- Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

Pasal 14

Untuk mencapai tujuan, organisasi perlu menetapkan:

- Strategi operasional
- Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko

Pasal 3

Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah

Pasal 13

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko terhadap:

- Tujuan Instansi Pemerintah
- Tujuan tingkat kegiatan

Pasal 16

Pimpinan Instansi pemerintah mengidentifikasi setiap risiko yang melekat pada sifat, misinya, atau pada kegiatan signifikansi dan kompleksitas dari setiap program spesifik yang dilakukan

DALAM PP 60 TAHUN 2008

PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH MEMILIKI TANGGUNG JAWAB UNTUK:

1

**MENYUSUN
PERENCANAAN DAN
MENETAPKAN
TUJUAN
ORGANISASI**



SESUAI VISI MISI

CASCADING SELARAS

ORIENTASI HASIL/
OUTCOME

PROGRAM DAN
KEGIATAN TEPAT



3

**MENCAPAI TUJUAN
ORGANISASI
MELALUI 4 TUJUAN
SPIP**



EFEKTIVITAS & EFISIENSI

KEANDALAN
PELAPORAN KEUANGAN

PENGAMANAN ASET
NEGARA

KETAATAN TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN

PENYELENGGARAAN SPIP:

1.Maturitas Penyelenggaraan SPIP

2.Manajemen Risiko Indeks (MRI)

**3.Indeks Efektivitas Pengendalian
Korupsi (IEPK)**

SPIP terdiri atas unsur:

a.lingkungan pengendalian;

b.penilaian risiko;

c.kegiatan pengendalian;

d.informasi dan komunikasi;

dan

e.pemantauan pengendalian
intern

Tabel II.1 - Bobot Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
PENETAPAN TUJUAN		40.00%
Kualitas Sasaran Strategis	50.00%	
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50.00%	
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100.00%	
STRUKTUR DAN PROSES		30.00%
Lingkungan Pengendalian		
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3.75%	
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3.75%	
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3.75%	
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3.75%	
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3.75%	
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3.75%	
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3.75%	
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3.75%	
Penilaian Risiko		
Identifikasi Risiko (2.1)	10%	
Analisis Risiko (2.2)	10%	
Kegiatan Pengendalian		

Kegiatan Pengendalian		
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2.27%	
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2.27%	
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2.27%	
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2.27%	
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2.27%	
Pemisahan Fungsi (3.6)	2.27%	
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2.27%	
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2.27%	
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2.27%	
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2.27%	

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2.27%	
Informasi dan Komunikasi		
Informasi yang Relevan (4.1)	5%	
Komunikasi yang Efektif (4.2)	5%	
Pemantauan		
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	7.50%	
Evaluasi Terpisah (5.2)	7.50%	
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100.00%	
PENCAPAIAN TUJUAN		30.00%
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi		
Capaian <i>Outcome</i>	15%	
Capaian <i>Output</i>	15%	
Keandalan Pelaporan Keuangan		
Opini LK	25%	
Pengamanan atas Aset		
Keamanan Administrasi	10%	
Keamanan Fisik	5%	
Keamanan Hukum	10%	
Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan		
Temuan Ketaatan	20%	
SUB JUMLAH HASIL	100.00%	
TOTAL BOBOT		100.00%

Tabel II.2 - Pembobotan Komponen dan Area Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Komponen/Area	Bobot Area	Bobot Komponen
PERENCANAAN		40.00%
Kualitas Perencanaan	40.00%	
KAPABILITAS		30.00%
Kepemimpinan	5.00%	
Kebijakan Manajemen Risiko	5.00%	
Sumber Daya Manusia	5.00%	
Kemitraan	2.50%	
Proses Manajemen Risiko	12.50%	
HASIL		30.00%
Aktivitas Penanganan Risiko	18.75%	
<i>Outcomes</i>	11.25%	
TOTAL BOBOT		100.00%

Tabel II.3 - Pembobotan Pilar dan Indikator Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Pilar/Indikator	Bobot Indikator	Bobot Pilar
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI		48%
Kebijakan Antikorupsi	9.60%	
Seperangkat Sistem Antikorupsi	7.20%	
Dukungan Sumber Daya	7.20%	
<i>Power</i> (Kuasa & Wewenang)	14.40%	
Pembelajaran Antikorupsi	9.60%	
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN		36%
Asesmen Dan Mitigasi Risiko Korupsi	9.00%	
Saluran Pelaporan Internal Yang Efektif dan Kredibel	3.60%	
Kepemimpinan Etis	9.00%	

Mengenali Kegiatan Pengendalian yang Seharusnya Ada

Bentuk-bentuk kegiatan pengendalian

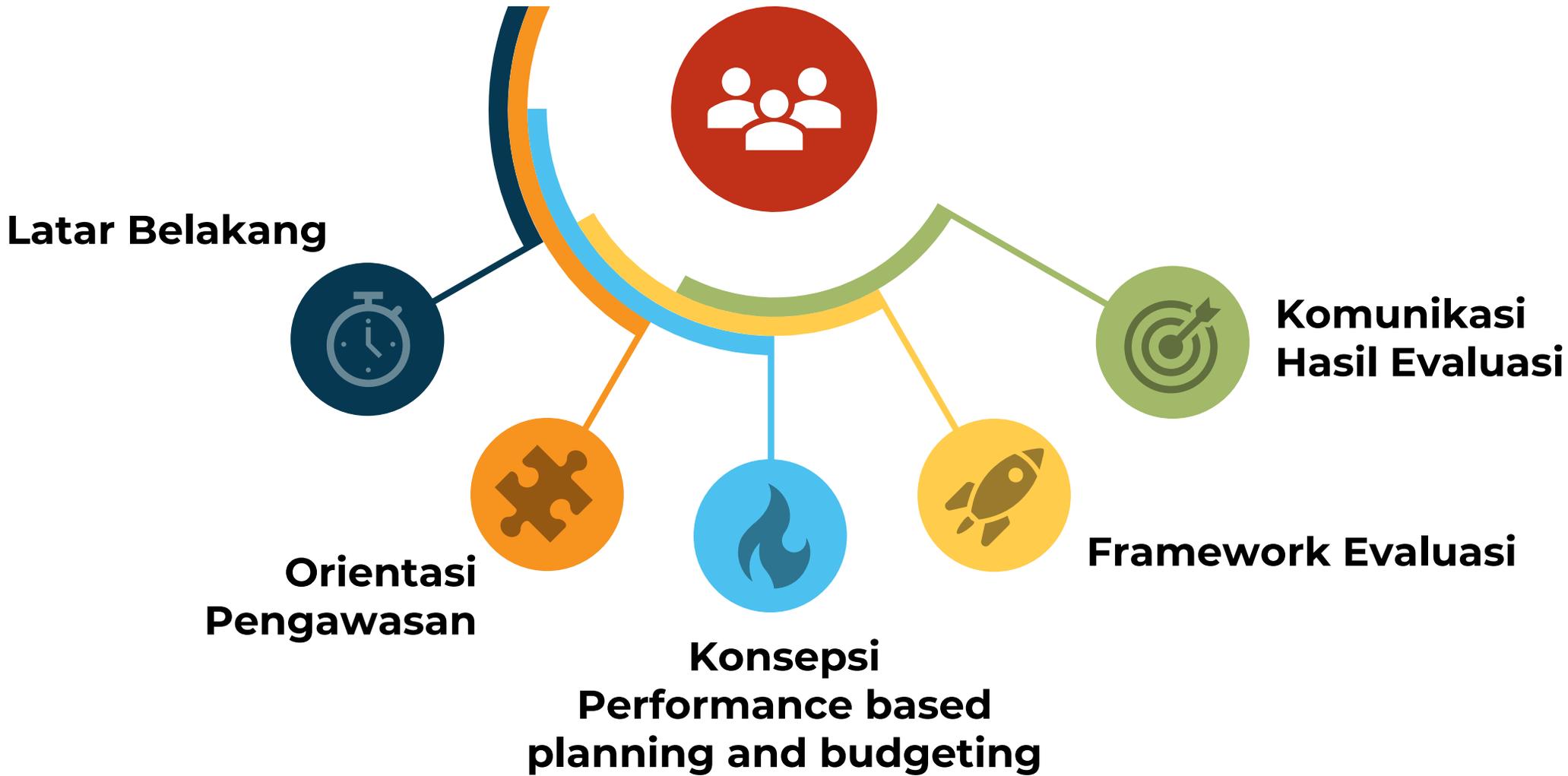
- ▶ reviu atas kinerja instansi pemerintah
- ▶ pembinaan sumber daya manusia
- ▶ pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- ▶ pengendalian fisik atas aset
- ▶ penetapan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
- ▶ pemisahan fungsi
- ▶ otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- ▶ pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- ▶ pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- ▶ akuntabilitas atas sumber daya dan pencatatannya
- ▶ dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern dan transaksi/kejadian penting.

Kegiatan pengendalian yang dibangun hendaknya bersifat preventif, mitigatif, ataupun keduanya.

EVALUASI ATAS

Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah





01 Fokus Pengawasan BPKP: Mengawal Tercapainya Tujuan Pembangunan

02 **Perencanaan** merupakan **kunci** keberhasilan **pencapaian tujuan**

Permasalahan



- Kegiatan selesai terlaksana
- Tingkat penyerapan anggaran tinggi



Hasil yang dirasakan masyarakat kurang optimal

RESULT ORIENTED GOVERNMENT

PEMERINTAHAN BERORIENTASI HASIL

"membiayai hasil, bukan masukan (INPUT)"

BERAPA BESAR DANA YANG TELAH DAN AKAN DIHABISKAN

INPUT ORIENTED



PERUBAHAN PARADIGMA

OUTCOME ORIENTED

berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan

03 BPKP mengawal **akuntabilitas keuangan** dan **akuntabilitas pembangunan**



Keuangan

Kepatuhan terhadap pertanggungjawaban keuangan negara



Kinerja

(Efektif, Efisien, dan Ekonomis)

Akuntabilitas Kinerja menjadi bagian **yang tidak terpisahkan** dengan akuntabilitas keuangan

PP Nomor 8/2006

Fenomena



- Kegiatan selesai terlaksana
- Tingkat penyerapan anggaran tinggi



Hasil yang dirasakan masyarakat kurang optimal

Mengapa?

- Kegiatan yang dirancang tidak mengarah ke dampak
- Ukuran keberhasilan tidak dirancang dengan baik, sehingga kegiatan kehilangan fokus
- Belanja yang tidak sesuai dengan maksud kegiatan

Perencanaan merupakan **kunci** keberhasilan **pencapaian tujuan**



BPKP

**BERPERAN MEMASTIKAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
DIRANCANG SECARA EFEKTIF DAN
EFISIEN UNTUK MENGHASILKAN
MANFAAT SEBESAR-BESARNYA BAGI
MASYARAKAT**

Keterbatasan Sumber Daya Menuntut Langkah-langkah Efisiensi

Perlu adanya refocussing program/kegiatan dan penganggaran untuk memastikan setiap rupiah belanja pemerintah **berdampak secara optimal** terhadap pencapaian pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional

LATAR BELAKANG

Keterbatasan sumberdaya

Publik menuntut peningkatan kualitas pelayanan

Budget Reform:

Dari sekedar alokasi tahunan yang didistribusikan antar instansi dan dilaporkan realisasinya

Menjadi **anggaran** yang sinkron dengan **perencanaan, operasional, dan pengukuran kinerja** (Super Budgeting)

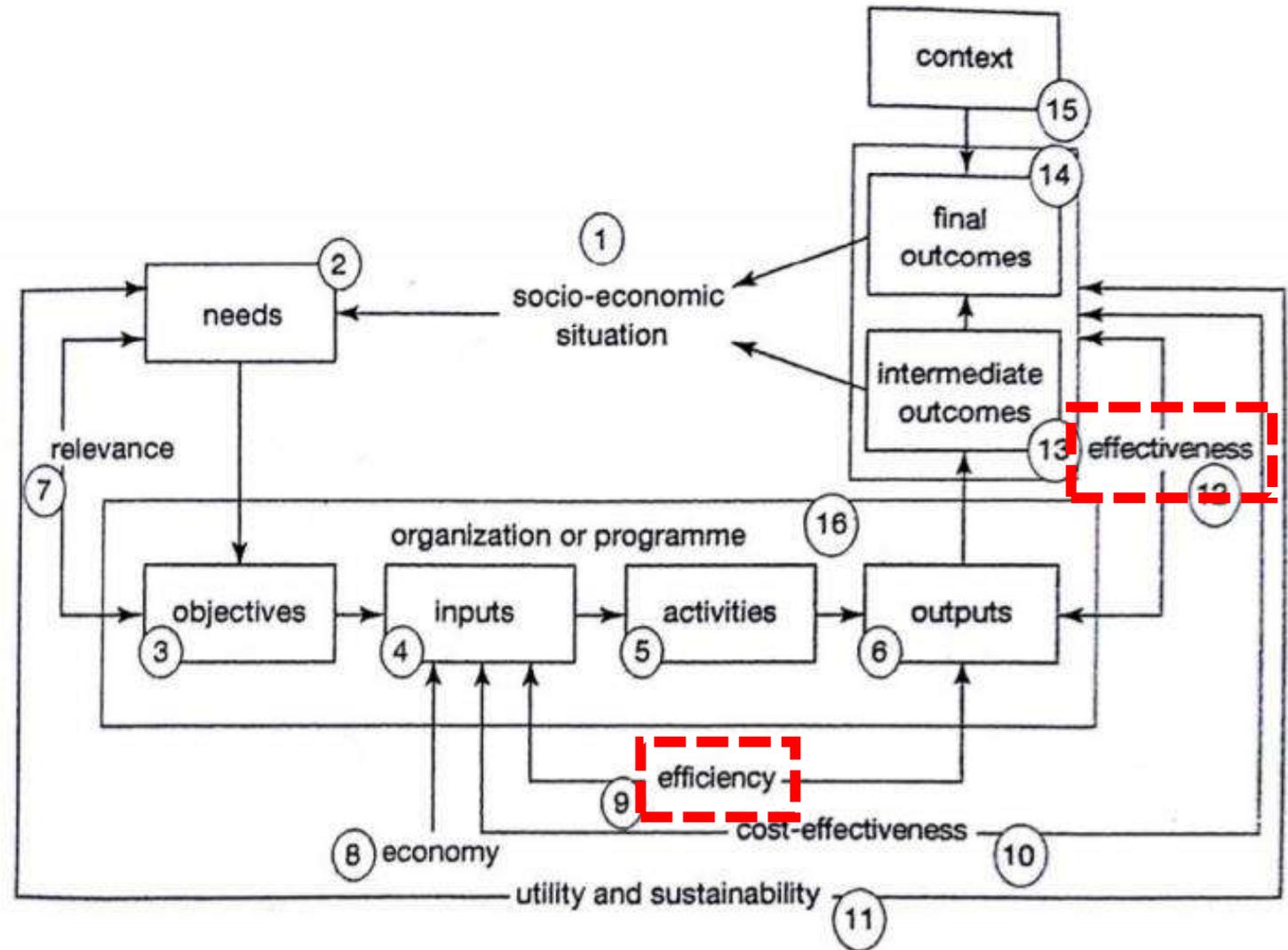
Budget Savings

EFEKTIF

Program/kegiatan/sub kegiatan relevan mencapai sasaran strategis.

EFISIEN

Rincian belanja relevan mewujudkan output sub kegiatan.



Gambar 2.1 *The Production Model of Performance*



Evaluasi menyorot **simpulan efektivitas** dan **efisiensi alokasi belanja** untuk mencapai tujuan



Evaluasi dilakukan atas dokumen perencanaan **APBN/D tahun berjalan**

Manfaat Evaluasi



Tingkat Pemd

1. Potensi ketercapaian sasaran pembangunan daerah
2. masukan perbaikan untuk anggaran perubahan dan/atau penganggaran tahun berikutnya



Tingkat Nasional

1. Masukan kebijakan perencanaan dan penganggaran nasional
2. mapping kualitas penganggaran daerah
3. masukan kebijakan untuk meningkatkan kualitas transfer daerah

Evaluasi perencanaan dan penganggaran APBN/D merupakan bagian dari desain pengawasan BPKP yang berkelanjutan



RANCANGAN EVALUASI TAHUN 2021 (khusus Pemerintah Daerah)

Evaluasi dilakukan atas sektor-sektor:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pengentasan kemiskinan
4. Pertumbuhan ekonomi daerah
5. Pariwisata

Obyek evaluasi :

1. Seluruh Pemerintah Provinsi
2. Minimal 2 Kab/Kota atau 10% dari jumlah kab/kota yang ada.

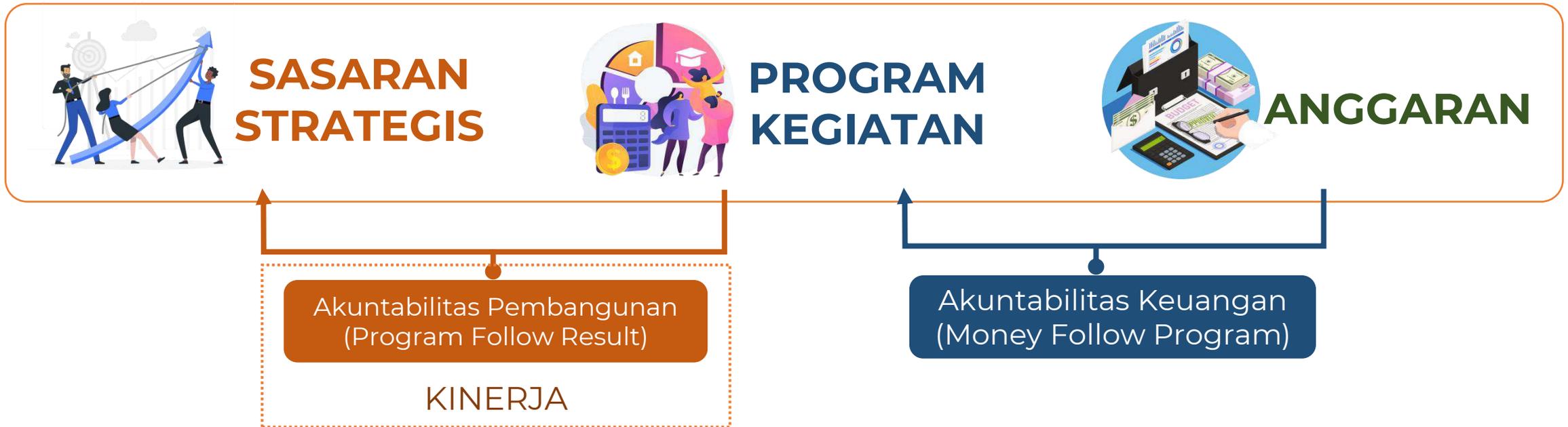
Pelaksanaan evaluasi pada triwulan II. desk dan field evaluation maksimal minggu keempat Mei.

Penjaminan kualitas diselesaikan maksimal minggu ketiga Juni.

OPD yang dievaluasi:

1. OPD yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
2. OPD yang menyelenggarakan urusan kesehatan;
3. OPD yang menyelenggarakan urusan sosial;
4. OPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum;
5. OPD yang menyelenggarakan urusan perdagangan;
6. OPD yang menyelenggarakan urusan perindustrian;
7. OPD yang menyelenggarakan urusan koperasi dan usaha kecil menengah;
8. OPD yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja;
9. OPD yang menyelenggarakan urusan pariwisata;
10. OPD yang memiliki fungsi perencanaan pemerintah daerah; dan
11. Inspektorat.

KONSEPSI PENGGANGGARAN BERBASIS KINERJA



ORIENTASI PENGAWASAN

“Setiap program dan kegiatan dari penyelenggara negara **harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya**”

Makna Akuntabilitas

Perubahan paradigma

BERAPA
BESAR DANA
YANG TELAH
DAN AKAN
DIHABISKAN



Keuangan

Kepatuhan terhadap pertanggungjawaban keuangan negara



kinerja

(Efektif, Efisien, dan Ekonomis)

Akuntabilitas Kinerja menjadi bagian **yang tidak terpisahkan** dengan akuntabilitas keuangan
PP Nomor 8/2006

RESULT ORIENTED GOVERNMENT

"membayar hasil, bukan masukan"
PEMERINTAHAN BERORIENTASI HASIL
(INPUT)

INPUT ORIENTED

BERAPA
BESAR DANA
YANG TELAH DAN
AKAN
DIHABISKAN



PERUBAHAN
PARADIGMA

OUTCOME ORIENTED

BESAR
KINERJA
(OUTPUT
DAN
OUTCOME)
YANG
DIHASILKAN
DARI
PELAKSANAAN
PROGRAM
DAN
KEGIATAN



PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA



**MERUMUSKAN
TUJUAN/SASARAN
PRIORITAS YANG
JELAS**



**MENETAPKAN UKURAN
KINERJA DAN TARGET
UNTUK MENGUKUR
KEBERHASILAN**

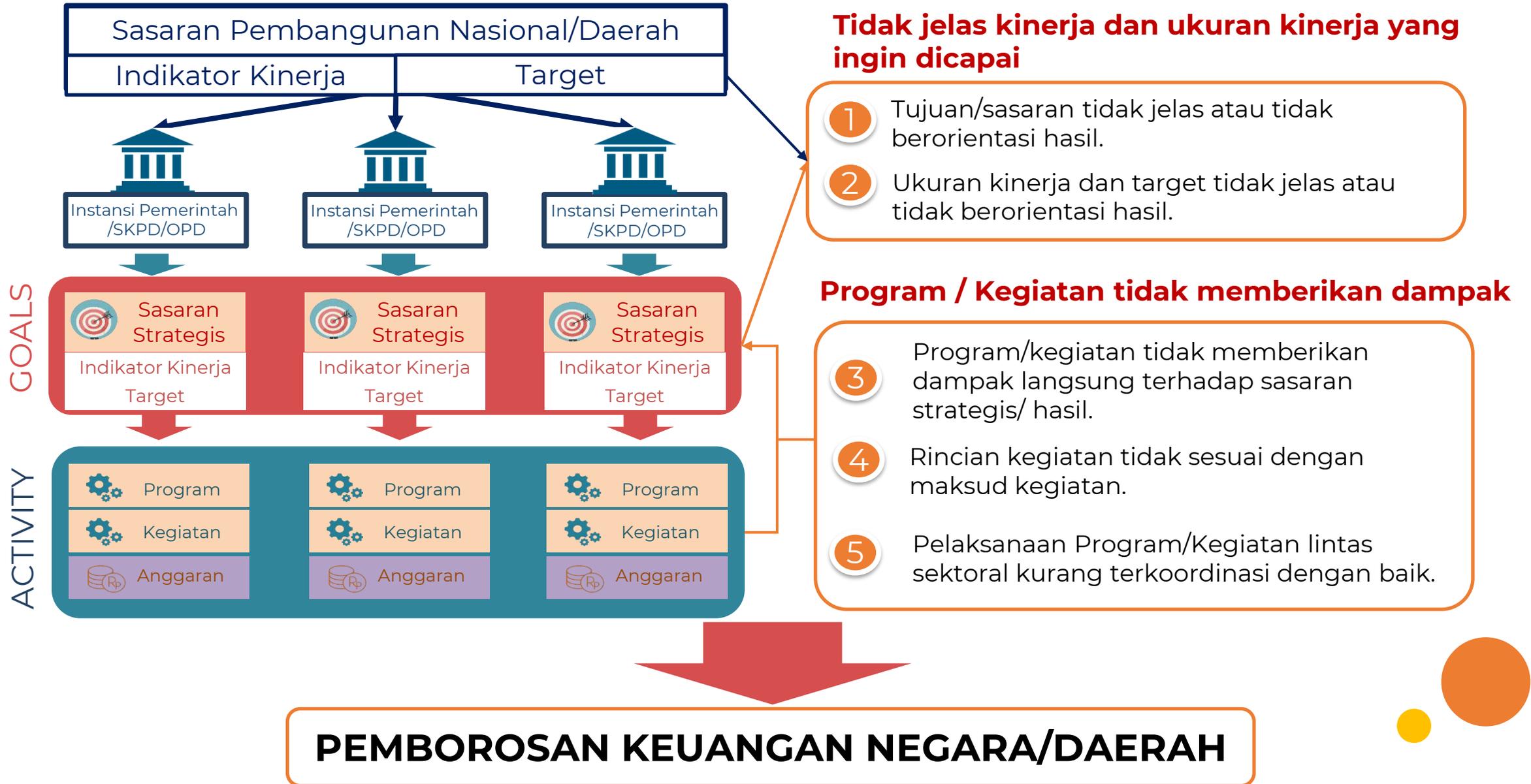


**MERUMUSKAN
PROGRAM/KEGIATAN YANG
MENDUKUNG
TUJUAN/SASARAN**



**MENETAPKAN ANGGARAN
SESUAI DENGAN
PROGRAM/KEGIATAN
YANG TELAH
DIRUMUSKAN**



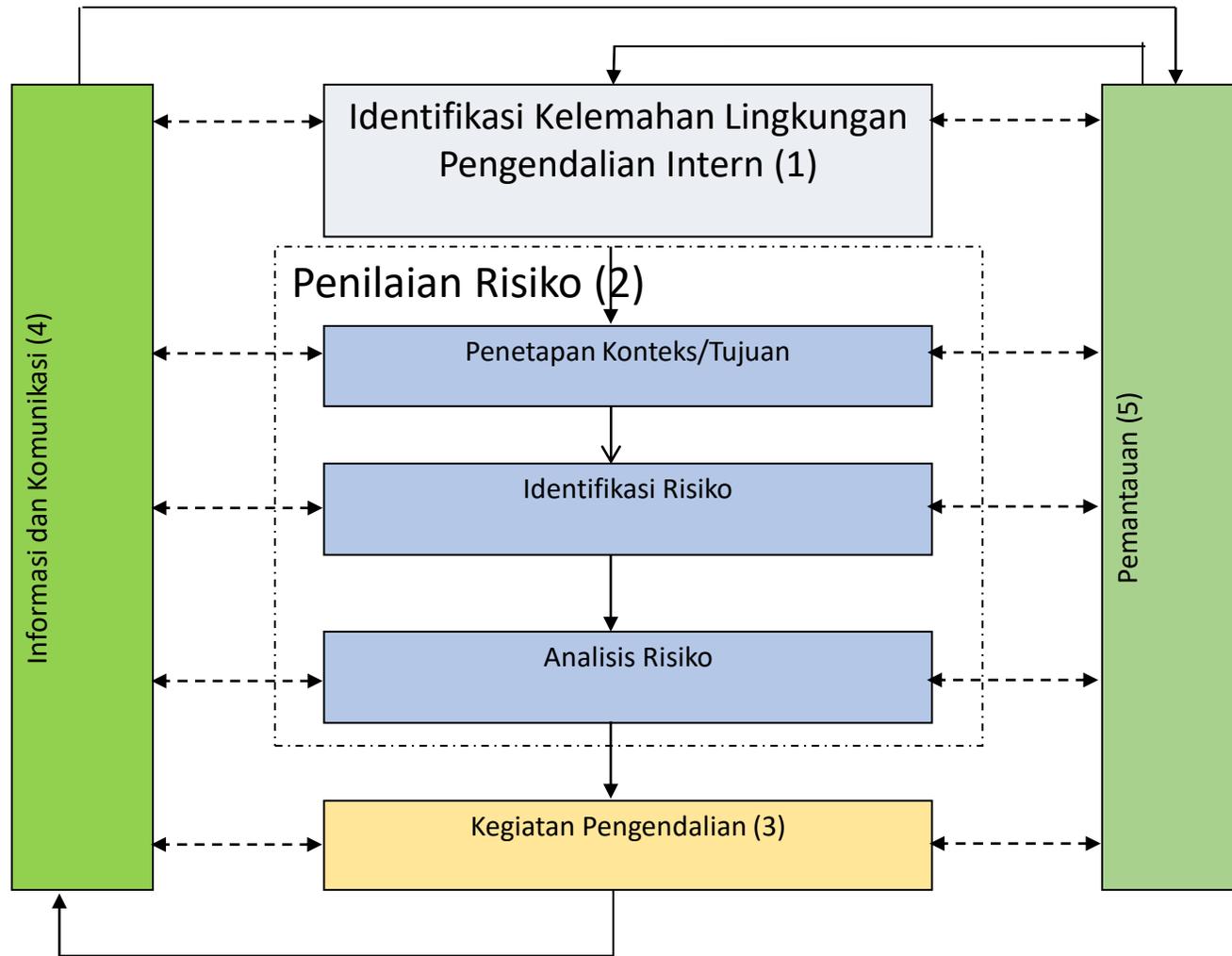




BPKP SIAP MENGAWAL **AKUNTABILITAS** APBN DAN APBD

Pemerintah daerah dengan capaian maturitas SPIP level 3 telah melakukan penilaian risiko, namun **masih terdapat permasalahan-permasalahan** diantaranya:

1. Kebijakan yang menjadi acuan dalam penilaian risiko masih berupa perintah/himbauan untuk melakukan penilaian risiko yang tertuang dalam kebijakan penyelenggaraan SPIP, dan belum terdapat pedoman pengelolaan risiko yang mengatur secara lebih teknis;
2. Penilaian Risiko masih bersifat formalitas dan belum menjadi pertimbangan dalam perencanaan pengawasan;
3. Rencana Tindak Pengendalian tidak ditindaklanjuti;
4. Waktu pelaksanaan penilaian risiko tidak terstandar, dilakukan sewaktu-waktu;
5. Penilaian Risiko bersifat manual belum menggunakan aplikasi;
6. Tahapan penilaian risiko tidak dilakukan sesuai ketentuan;
7. Penilaian risiko masih atas kegiatan operasional, belum atas tujuan strategis;
8. Penilaian risiko dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing OPD, fokus pada tujuan OPD belum pada tujuan pemerintah daerah (lintas OPD);
9. Tidak jelas pihak yang melakukan penilaian risiko;
10. Pejabat strategis belum dilibatkan dalam penilaian risiko;
11. Belum terdapat kegiatan monitoring atas proses penilaian risiko.



Dalam penerapan pengelolaan risiko, terdapat dua hal penting yang perlu menjadi perhatian yaitu pembangunan/ perbaikan **Lingkungan Pengendalian** yang mendukung penciptaan **budaya** dan **sistem pengelolaan risiko**, dan implementasi unsur **Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi** serta **Pemantauan** menunjukkan pelaksanaan **proses pengelolaan risiko**

**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...
Periode Penilaian 01 Juli 20XX-1 sampai dengan 30 Juni 20XX**

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	FALSE	50,00%		0,00		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	FALSE	50,00%		0,00		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		0,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		0,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	1,500	3,75%		0,06		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,554	3,75%		0,06		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,000	3,75%		0,08		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,875	3,75%		0,07		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	2,000	10%		0,20		
Analisis Risiko (2.2)	1,767	10%		0,18		

Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	1,950	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	2,750	5%		0,14		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	2,000	7,50%		0,15		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,750	7,50%		0,13		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,119		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,636	

PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	3	15%		0,45		
Capaian <i>Output</i>	3	15%		0,45		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	3	5%		0,15		
Keamanan Hukum	2	10%		0,20		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	2	20%		0,40		
SUB JUMLAH HASIL			100,00%		2,70	
BOBOT HASIL				30,00%		0,81
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						1,446

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)

1,24

AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI			
PERENCANAAN	40,00%		0,00			
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	0,00	0,00			
KAPABILITAS	30,00%		0,57			
KEPEMIMPINAN	5,00%	1,65	0,08			
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	2,00	0,10			
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	2,00	0,10			
KEMITRAAN	2,50%	1,88	0,05			
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	1,90	0,24			
HASIL	30,00%		0,67			
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	1,77	0,33			
<i>OUTCOMES</i>	11,25%	3	0,34			
TOTAL	100,00%		1,24			

TERIMA KASIH